

EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT NGATA TORO

Arto Oktavianto, Suryaman Mustari Pide, Sri Susyanti Nur

Universitas Hasanuddin

Email: arto.oktavianto@gmail.com

Abstract

This research is aimed to know both the existence of the indigenous people of Ngata Toro and the law protection. This research type is empirical research. The data is qualified as primary and secondary data. Primary data is obtained through interviews and secondary data is obtained through study of literature. The collected data is treated with a descriptive conclusion of qualitative analysis approach. The research result shows the regional right existence of the indigenous people in Sigi, Central Sulawesi which is still existing and running as normal according to the public applied rules. The law protection of indigenous people of Ngata Toro in a regency has not been suitable yet with the existent rule inasmuch as many of harm things happens to the indigenous people of Ngata Toro and there is no regional rule to protect the indigenous people's rights. This research has become a reference to the local government to make regional rule of the indigenous people of Ngata Toro.

Keywords : Regional right, indigenous people, law protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ngata Toro dan untuk mengetahui perlindungan Hukum. Sifat Penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan pendekatan analisis kualitatif kesimpulan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah tetap masih ada dan masih berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkup masyarakat. Perlindungan Hukum Terhadap masyarakat Hukum Adat Ngata Toro di Kabupaten belum sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan banyak terjadi hal yang merugikan masyarakat adat ngata toro dan tidak adanya Peraturan Daerah yang melindungi Hak-hak masyarakat Hukum Adat. Penelitian ini menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat Ngata Toro

Kata Kunci : Hak ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Hukum Adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, masyarakat nenek moyang kita sudah menganut sistem hukum tersendiri meski adat yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal disbanding hukum kolonial yang sifatnya universal, tetapi dibalik kelokalannya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memperuntuh sifat kebhinekaan bangsa ini.¹

Pembahasan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat adat ngata toro ini akan dilakukan peneliti dengan mengangkat suatu kejadian dimana Keberadaan tanah ulayat bagi masyarakat adat ngata toro dikecamatan kulawi kabupaten sigi. kerap kali menjadi sumber perselisihan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat adat setempat. Dengan adanya Sertifikat HGU milik Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah membuat masyarakat Hukum Adat Ngata Toro terbatas melakukan suatu aktifitas untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 100 hektare tanah milik masyarakat adat dijadikan perkebunan oleh Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah, masyarakat Adat Ngata Toro kian terdesak dikarenakan jumlah penduduk semakin banyak dan lahan garapan milik masyarakat Ngata Toro semakin sempit.

Sampai pada saat sekarang masyarakat Adat Ngata Toro kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Sigi yang sampai pada saat ini tidak ada suatu peraturan daerah yang dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat ngata toro. Perlunya peraturan yang melindungi masyarakat adat, pertama untuk menjamin perlindungan hak masyarakat hukum adat terhadap hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun atau pewarisan dari leluhur mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Masyarakat Hukum Adat Ngata Toro di Kabupaten sigi, populasi penelitian ini yaitu Dewan Adat Ngata Toro Populasi penelitian meliputi Dewan Adat Ngata Toro dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sigi. Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil penelitian data pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

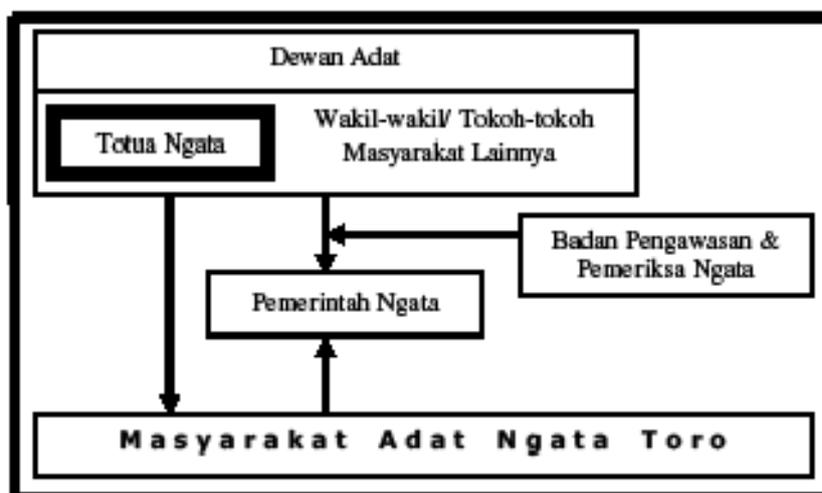
¹ A. Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan datang*, cetakan ke 3, Penerbit Kencana, Jakarta. 2017

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ngata Toro dan Perlindungan Hukum

Hak Ulayat mempunyai kekuatan mengikat keluar yaitu anggota suku bangsa lain (juga tetangganya) tidak boleh mengambil manfaat dari tanah daerah hak ulayat, kecuali dengan izin kepala suku/masyarakat hukum, dan dengan memberi semacam hadiah kecil (di Aceh disebut wang pemasukan; Jawa disebut mesu) lebih dulu. Izin yang diberikan kepada suku bangsa lain bersifat sementara, misalnya untuk selama musim panen. Pada prinsipnya, anggota lain suku tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah-tanah tersebut.²

Struktur Lembaga Adat



Sumber : Kantor Desa Toro, (2020).

Struktur hubungan antar lembaga seperti yang terlihat pada Gambar di atas menghasilkan kesepakatan-kesepakatan berikut ini :

- Memperluas keanggotaan Dewan Adat dengan menyertakan tokoh-tokoh masyarakat di luar Totua Ngata.
- Menjadikan Pemerintah Desa identik dengan fungsi *Galara* yang pada masa lampau dibawah kendali Totua Ngata dan sekarang diperluas.
- Memapankan insitusi permusyawaratan yang disebut Lembaga Musyawarah Ngata Toro.

Hal ini menghasilkan struktur pemerintahan lokal yang disusun dengan suatu cara yang mencerminkan pembagian kewenangan legislatif dan eksekutif yang serupa dengan

² Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, cetakan kesatu, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

pemerintahan negara. Patut dicatat bahwa upaya penataan kelembagaan yang menghasilkan struktur kelembagaan tersebut dilakukan dengan mencari rujukan historis terhadap bentuk-bentuk pemerintahan asli pra-kolonial yang pernah berlaku di daerah ini.

Desa (bahasa setempat *Ngata*) Toro telah terbentuk beberapa abad lampau dan telah mewujudkan sebuah komunitas yang mapan sejak masa pra-kolonial. Tidak ada catatan yang pasti tentang masa desa ini terbentuk. Namun, penuturan orang-orang tua mengisahkan bahwa pada masa pra-kolonial masyarakat Toro telah mengalami tiga periode kepemimpinan, yaitu di bawah kepemimpinan *Mpone*, *Ntomatu*, dan *Menanca* (*Balawo*). Kisah lisan ini disertai penegasan tambahan bahwa periode masing-masing tokoh ini berlangsung cukup lama.

Mpone merupakan tokoh yang merintis cikal bakal terbentuknya komunitas Toro. Ia adalah kepala rombongan yang mengungsi dari Malino dan yang kemudian membentuk generasi pertama penduduk asli Toro. Malino adalah pemukiman asal mereka (kampung tua) yang terletak sekitar 40 km arah barat daya Desa Toro sekarang. Mitos setempat mengisahkan bahwa kepergian mereka dari kampung tua itu adalah karena serangan makhluk halus (*bunian*). Akibat serangan ini hampir seluruh penduduk Malino musnah. Hanya beberapa keluarga yang berhasil menyelamatkan diri. Setelah berpindah-pindah dari beberapa tempat, pelarian dari Malino ini akhirnya menetap di lokasi Desa Toro sekarang. Hak-hak asli rakyat yang berdasarkan hukum adat semakin terdesak dan pada posisi yang defensif melawan hak-hak baru berdasarkan ketentuan hukum tertulis yang diberikan oleh Negara yang tercermin dalam berbagai konflik sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia.³

Kepemimpinan *Balawo*, demikian menurut kisah lisan, kegiatan pembukaan hutan dan penataan pemukiman berlangsung lebih sistematis. Pada masa itu, komposisi penduduk Toro juga mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan jumlah penduduk ini terutama berpangkal dari beberapa keluarga isteri Balawo yang berasal dari Rampi, sebuah daerah yang kini termasuk wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Setiba di Toro, oleh Balawo mereka diberi lahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka selanjutnya membaur dengan penduduk asli Toro melalui hubungan perkawinan. Pertemuan adat yang dilakukan ada beberapa macam antara lain:

- a. Pertemuan menyangkut hal-hal yang bersifat rahasia, yang dihadiri oleh *Maradika*, *Totua Ngata* dan *Tina Ngata*.
- b. Pertemuan untuk membahas kinerja *Tondo Ngata*, diikuti semua tokoh masyarakat termasuk perempuan, generasi muda dan anggota *Tondo Ngata*.
- c. Pertemuan yang membicarakan hal yang baru misalnya adanya peneliti yang masuk di wilayah hutan adat, pengambilan obat tradisional oleh para akademis,

³ Diah Pawestri Maharani, *Pembatasan Hak Menguasai Negara oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*, Jurnal Arena Hukum Vol. 9.

dan sebagainya yang menyangkut *Katuvua* dan *Hintuvu* di dalam Ngata, diikuti oleh seluruh komponen masyarakat termasuk perempuan dan generasi muda.

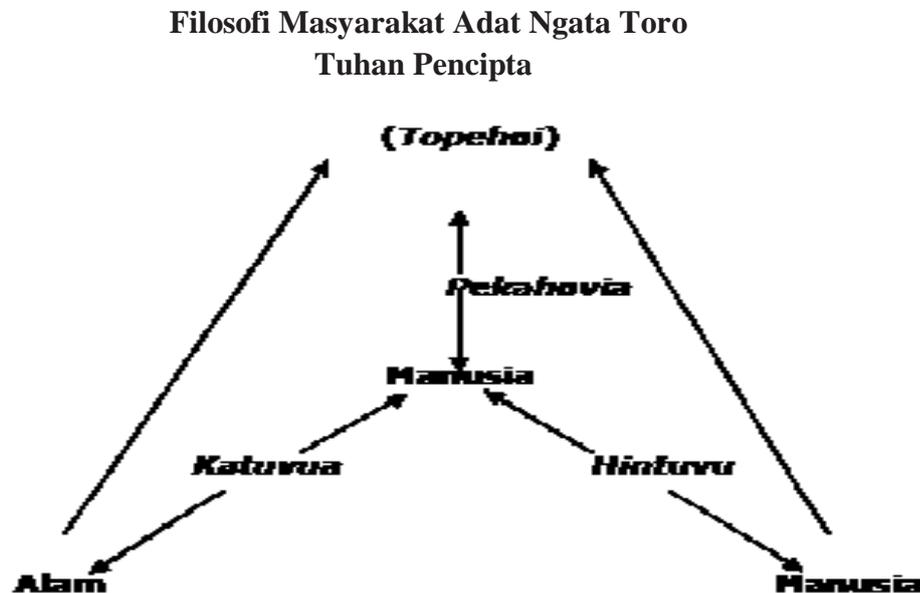
- d. Pertemuan membahas kerusakan hutan dan sebab-sebab kerusakan. Pertemuan ini dihadiri oleh *Maradika*, *Totua Ngata*, *Tina Ngata* dan *Tondo Ngata*.
- e. Pertemuan membahas batas wilayah adat dengan wilayah adat Ngata lain. Pertemuan ini dihadiri oleh *Maradika*, *Totua Ngata*, *Tina Ngata* dan *Tondo Ngata*.
- f. Pertemuan membahas pembukaan lahan, pengelolaan hasil hutan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya pemberitahuan (*Mehabi*) terlebih dahulu kepada komponen yang berkepentingan dalam hal perizinan. Pertemuan ini dihadiri oleh *Maradika*, *Totua Ngata*, *Tina Ngata*, *Tondo Ngata*, pemuda dan si pelaku.

Pada masa pra-kolonial, komunitas Toro seperti halnya komunitas desa-desa sekitarnya merupakan “Republik Desa” dalam arti sebenarnya (*doorpsrepubliken*), yakni kesatuan sosial politik otonom yang selain mempunyai harta kekayaannya sendiri juga berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak materiil adalah hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah. Adapun hak imateril dari masyarakat hukum adat adalah hak untuk memeluk agama lokal atau kepercayaan.⁴ Komunitas ini berada di luar perhatian kerajaan Islam yang berada di daerah pesisir. Selain karena letaknya yang terlalu jauh di pedalaman pegunungan, juga karena perhatian kerajaan-kerajaan Islam ini lebih tertuju keluar, yakni pada perdagangan antara pulau dan regional melalui jalur transportasi laut.

Hubungan antara komunitas Toro dengan desa-desa di sekitarnya membentuk sebuah federasi antar desa yang bersifat longgar dengan otonomi penuh dari setiap anggotanya. Federasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan politik dan pertahanan dalam menghadapi perang antar suku, namun selanjutnya juga diperkuat oleh hubungan ekonomi, jalinan kekerabatan, dan ikatan-ikatan moral kekerabatan dan solidaritas. Integrasi komunitas Toro kedalam struktur politik ini, baik semasa kolonial maupun kemerdekaan, telah membuatnya memperoleh berbagai rangsangan perubahan yang lebih intens dan luas. Semenjak itu, komunitas ini mengalami transformasi mendasar yang menjangkau segi-segi paling asasi dalam proses-proses perumusan kembali identitas, keagamaan, penataan teritori dan pemerintahan, transformasi lanskap, dan perubahan sosial lain secara umum.

⁴ Sukirno, *Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Masalah- Masalah Hukum Jilid 44, hlm. 328.

Penataan fungsi dan wewenang ini tetap berlandaskan pandangan dasar masyarakat adat Ngata Toro seperti yang digambarkan skema berikut ini.



Sumber : Kantor Desa Toro, (2020).

Upaya ini telah menghasilkan empat fungsi Lembaga Masyarakat Adat. sebagai berikut :

Fungsi-fungsi *Hintuvu*, yaitu menyangkut pengaturan hubungan antar anggota masyarakat, penyelesaian perselisihan di antara mereka, termasuk juga pelaksanaan upacara-upacara adat dan daur hidup. Visi hubungan antar manusia atau *Hintuvu*:

- a. *Pomebila* (saling menghargai, saling menghormati)
- b. *Mahingkau, Mome Panimpu* (bersatu, solidaritas)
- c. Fungsi-fungsi *Katuvua*, yang menyangkut pengaturan anggota masyarakat dalam interaksi dengan lingkungan sekitar, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- d. Fungsi-fungsi *Gagu ada*, pengelolaan kelengkapan adat yang mencakup bangunan tradisional (lobo), Huro, Tadulako, pakaian adat, peralatan upacara adat, peralatan seni, permainan tradisional dan sumber daya alam yang terkandung di dalam hutan adat.
- e. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masalah pengawasan dan penegakan hukum adat yang dilakukan oleh *Tondo Ngata*, baik yang menyangkut *Katuvua* maupun *Hintuvu*.

Pelaksanaan semua fungsi di atas dikoordinasikan dengan *Totua Ngata*. Perangkat-perangkat *Totua Ngata* dipilih berdasarkan atas pengabdian serta pemahaman dan penguasaan terhadap adat- istiadat (*Nopahu dan Hohora*). Diajukan dalam *Polibu Ngata* (pertemuan desa) yang dihadiri oleh masyarakat kemudian diangkat dan di

resmikan. Koordinasi pelaksanaan dan pengawasan fungsi dan wewenang di atas dilakukan pada tingkat boya.

Upaya penataan lembaga kepemimpinan lokal sebagaimana dipaparkan di atas, dengan demikian telah berhasil menyelaraskan empat lembaga yang ada dengan kesepakatan bahwa kesemuanya memiliki kedudukan setara dan akan menjalankan tugas pengurusan Ngata di Toro secara bersama-sama. Selain itu upaya tersebut juga telah memodifikasikan kelembagaan Totua Ngata menjadi sebuah lembaga dengan struktur dan fungsi yang lebih jelas dan terinci dengan tujuan agar lembaga ini bisa menjalankan tugas dan wewenang baru yang telah dibebankan atasnya sejalan dengan cita-cita untuk transformasi kelembagaan tradisional di Toro. Komposisi kepengurusan adat, tidak mempunyai ketua, sekretaris dan bendahara, dengan pengurus adat inti terdiri dari:

- a. *Maradika*
- b. *Totua Ngata*
- c. *Tina Ngata*

Orang menjadi *Maradika*, *Totua Ngata* dan *Tina Ngata* bukan melalui pemilihan, tetapi melalui *libu* (pertemuan) Ngata dan berdasar-kan garis keturunan. Posisi Lembaga Adat terhadap Pemerintah Ngata adalah Lembaga Adat merupakan mitra kerja dari Pemerintah Ngata dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. Kedua lembaga ini dibangun dan berjalan bersama seperti terlihat pada stuktur kelembagaan yang ada di Ngata Toro. Aturan adat di masukan dalam peraturan Ngata melalui musyawarah Ngata, hal ini disesuaikan dengan meninjau mana aturan adat yang masih bisa dipertahankan dan mana hukum adat yang tidak relevan lagi di berlakukan karena sudah di akomodasikan oleh hukum negara. Kerja sama antara Lembaga Adat dan Pemerintah Ngata bertujuan agar aturan yang dikeluarkan tidak tumpang tindih. Peraturan Ngata yang mengatur *Katuvua* dan *Hintuvu* disusun bersama melalui musyawarah Ngata yang kemudian diputuskan sebagai aturan dan menjadi pedoman bagi masing-masing lembaga.. Hal ini dimaksudkan agar hak dan tanggung jawab kedua lembaga dalam peraturan tersebut lebih jelas. Hal lain adalah jika aturan yang dibuat sudah diakomodasikan oleh Pemerintah Ngata menjadi Peraturan Ngata maka aturan adat tidak diberlakukan lagi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Misalnya, hal izin pengolahan kayu untuk ramuan rumah masyarakat, surat izin dibuat oleh Pemerintah Ngata dan ditanda tangani oleh kepala Ngata dan Lembaga Adat. Implikasinya, praktek penebangan di kawasan hutan adat Ngata Toro yang tidak memenuhi Peraturan Ngata akan dikenai sanksi.

Keseluruhan wilayah Ngata Toro, termasuk wilayah adat yang diklaimnya, didominasi oleh daerah pegunungan. Di dalam wilayah ini mengalir beberapa sungai besar seperti: Sungai Sopa, Biro, Pangemoa, Alumiu, Pono, Bola, Mewe dan Kadundu. Bulu Podoroa atau secara administratif sebelah timur dengan Kaduwa dan Katu (Ue Biro dan Ue Hawuraga), Bulu Mahue dan Potovoa Noa atau secara administratif sebelah Selatan dengan O'o Parase dan Lawua, Bulu Tobengi dan Ue Halua atau secara

administratif sebelah barat dengan Sungku dan Winatu. Wilayah pemukiman dan pertanian Desa Toro merupakan sebuah hamparan lembah yang dikelilingi pegunungan dengan dua barisan bukit yang menjulur keluar. Dengan kontur seperti ini perkembangan perkampungan mengikuti kontur sik yang ada dan membentuk serupa huruf “W” apabila dilihat dari sisi kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Wilayah pemukiman penduduk terkonsentrasi di salah satu potongan yang hampir simetris, sementara wilayah persawahan tersebar di sepanjang jari-jari huruf “W” tersebut.

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat secara teoritis adalah faktor genealogis (keturunan) dan faktor Teritorial (wilayah).⁵ Hingga tahun 2019, jumlah penduduk Toro telah mencapai 2.349 jiwa terdiri dari 639 keluarga. Dengan jumlah ini tingkat kepadatan penduduk di Toro, dibandingkan luas seluruh wilayah adat yang diklaim, adalah 87 orang/km². Tabel berikut ini memperlihatkan data kependudukan di Toro secara lebih rinci. Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat harus dibuat dalam bentuk keputusan kepala daerah.⁶

Tabel 1. Data Kependudukan Ngata Toro, 2019, Kabupaten Sigi , Sulawesi Tengah

Jenis	Jumlah
Luas desa	22.95 Ha
Jumlah Penduduk	2.349 Jiwa
Laki-laki	1.259 Jiwa
Perempuan	1.090 Jiwa
Jumlah KK	639 kk
Usia 0-10	386 Jiwa
Usia 11-59	1.778 Jiwa
Usia 60 ke atas	185 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Toro, (2020).

Pengaturan Tanah Hak ulayat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan pasal 6 UUPA, Melalui Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945 menentukan bahwa Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, Penguasaan masih membutuhkan campur tangan hukum untuk menentukan apakah

⁵ C. Dewi Wulan Sari, *Hukum Adat Indonesia*, cetakan kedua, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2012

⁶ Muh. Afif Mahfud, *Perlindungan terhadap Indigenous People dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Internasional Vol.I, hlm. 69.

penguasaan itu diakui dan dilindungi, atau justru sebaliknya tidak memperoleh pengakuan hukum.⁷

Setiap pelanggaran terhadap semua peraturan atau hukum adat yang menyangkut kepemilikan dan pengelolaan SDA yang ada di lingkungan wilayah adat Ngata Toro, dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Kepemilikan yang tidak berdasarkan hukum adat dikenakan sanksi adat berupa: *Tolu Ongu, Tolu Mpulu, Tolu Ngkau* (Tiga ekor hewan kerbau atau sapi, tiga puluh dulang, dan tiga lembar kain *Mbesa*). Jika dirupiahkan bernilai 5 juta rupiah.
- b. Pengelolaan hasil hutan kayu, rotan, pakanangi, gaharu, dan damar yang tidak berdasarkan ketentuan hukum adat, dikenakan sanksi adat berupa: *Tolu Ongu, Tolu Mpulu, Tolu Tigkau* (3 ekor hewan kerbau atau sapi, 30 dulang, dan 30 lembar kain *Mbesa*).
- c. Pemasangan jerat untuk hewan yang dilindungi (anoa dan babi rusa), dikenakan sanksi adat yaitu: *Tolu Ongu, Tolu Mpulu, Tolu Ngkau*. (Tiga ekor hewan kerbau atau sapi, 30 dulang, 30 (kain *Mbesa*).
- d. Pertambangan emas yang tidak berdasarkan hukum adat, dikenakan sanksi adat yaitu: *pitu ongu, pitu mpulu, pitu ngkau* (tujuh ekor hewan kerbau atau sapi, 70 dulang, dan 70 kain *Mbesa*). Jika dirupiahkan bernilai 11 juta rupiah.
- e. Penangkapan ikan yang menggunakan alat kimia, strom, racun, dikenakan sanksi adat: *Rongu, Rompulu, Rongkau*. (dua ekor kerbau atau sapi, 20 dulang, 2 lembar kain *Mbesa*), setara dengan 3 juta rupiah.
- f. Penggunaan senjata api, senapan angin, bedil dikenakan sanksi adat yaitu: *Hangu, Hampulu, Hongkau* (Satu ekor hewan kerbau atau sapi, 10 dulang, satu lembar kain *Mbesa*). Jika dirupiahkan sekitar 1,5 juta rupiah.
- g.

Tabel 2. Tata Ruang Masyarakat Adat

Ruang	Fungsi/Peruntukan	Aturan Adat	Kedala Dalam Pengelolaan
Hutan Larangan (Wana ngkiki, Wana, Wanambongo, Katumpua, Kapali)	<ul style="list-style-type: none"> - Suaka - Tempat Binatang - Sumber Air - Tempat Ritual - Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Givu kalua melanggar peruntukan - Lepas ayam hidup - Tidak boleh diolah 	<ul style="list-style-type: none"> - saling klaim wilayah adat - Dikuasai oleh negara - Diolah oleh perusahaan

⁷Muhammad Ilham Arisaputra dan Sri Wildan Alnun Mardiah, *Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam pengembangan administrasi Pertanahan di Indonesia; Studi Komparatif*, Jurnal Amanna Gappa Vol. 27, hlm. 4.

Hutan Cadangan (Pongale/Havoyopa)	- Warisan anak cucu - Mengambil kayu ramuan rumah - Pengambilan rotan	- Mogome - Mompepoyu - Nabanta - Mehabi - Mosarambulugana - Givu	- Perampasan pemilikan baik secara eksternal maupun internal - dikuasai oleh negara dianggap lahan tidur - Diolah oleh perusahaan
Hutan Olahan (Oma, Batingea, Pohowapangka)	- Kebun - Lading - Padang	- Nompehule - Vunca - Givu dalam pengelolaan - Nevula - Magane	- Tata Batas
Kawasan Perkampungan	- Sawah - Pemukiman - DII	Sama dengan hukum adat olahan	

Sumber : Data Kantor Desa Toro, (2020).

Menurut Sudikno Mertokusumo dan Urip Santoso bahwa “ Hak Ulayat merupakan hak dari masyarakat dalam hukum adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah Hak Ulayat tersebut”.⁸ Konsep Hak Ulayat sebagai suatu hak adalah kepunyaan bersama (hak milik komunal), mempunyai kewenangan/kekuasaan untuk menggunakan atau mengambil manfaat serta mengatur dalam arti mengatur pengurusan, penguasaan, penggunaan, peruntukkan, pemeliharaan dan sebagainya. harus dapat diterapkan serta tidak boleh membuat kelompok tertentu menjadi susah atau tidak beruntung.⁹

Berdasarkan hukum adat setempat. Sifat hubungan ini menunjukkan sifat otonomi masyarakat atas hak ulayat. Keotonomian itu, sebagaimana dilukiskan Ter Haar dengan

⁸ Sudikno Mertokusumo dan Urip Santoso, *Hukum Agraria Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2006

⁹ Jawahir Tontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta Vol. 10, hlm. 10.

mengatakan bahwa gerombolan (kelompok) itu berhak atas Tanah, mempunyai hak tertentu atas tanah baik ke “dalam” maupun ke “luar”.¹⁰

KESIMPULAN

Keberadaan Hak Ulayat pada masyarakat Hukum Adat Ngata Toro masih ada hingga saat ini dikarenakan masyarakat hukum adat Ngata Toro Menjunjung Tinggi hukum adat dan menggunakan Keputusan Hukum Adat sebagai Pedoman melakukan segala sesuatu baik antara manusia dengan manusia atau manusia dengan alam. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk menjaga Hak-hak masyarakat Hukum Adat Ngata Toro dengan merancang suatu Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat Ngata Toro untuk mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah.

¹⁰ Rosniar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, cetakan ke 2, penerbit Raja Grafindo Persada, Depok 2019

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan datang*, cetakan ke 3, Penerbit Kencana, Jakarta. 2017
- Dewi Wulan Sari (2012). *Hukum Adat Indonesia*, cetakan kedua, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Nico Ngani (2012), *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, cetakan kesatu, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rosniar Sembiring (2019). *Hukum Pertanahan Adat* , cetakan ke 2, penerbit Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sudikno Mertokusumo dan Urip Santoso (2006). *Hukum Agraria Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.

Jurnal

- Diah Pawestri Maharani (2016), *Pembatasan Hak Menguasai Negara oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*, Jurnal Arena Hukum Vol. 9.
- Jawahir Tontowi (2015), *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta Vol. 10 , hlm. 10.
- Muh. Afif Mahfud (2014). *Perlindungan terhadap Indigenous People dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Internasional Vol.I, hlm. 69.
- Muhammad Ilham Arisaputra dan Sri Wildan Alnun Mardiah (2019). *Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam pengembangan administrasi Pertanahan di Indonesia; Studi Komparatif*, Jurnal Amanna Gappa Vol. 27, hlm. 4.
- Sukirno (2015). *Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Masalah- Masalah Hukum Jilid 44, hlm. 328.